

Manajemen Publik dalam Transformasi Ekonomi Digital Sentra Wisata Kuliner di Surabaya

Alvi Nazwa Rindiana¹, Nailah Talitha Salsabila², Nayif Achmad Fannur³, Anisa Qorina Safitri⁴, Meirinawati⁵, Trenda Aktiva Oktariyanda⁶

¹ Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

² Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

³ Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

⁴ Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

⁵ Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

⁶ Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Corresponding Author:

Alvi Nazwa Rindiana, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: 25040674176@mhs.unesa.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of public management in navigating the digital economic transformation at the Culinary Tourism Centers (SWK) in Surabaya through the POSC theory approach. The research employs a qualitative descriptive method with a literature study design, evaluating various policy documents, government publications, and scientific articles related to the implementation of the E-PEKEN platform and the QRIS payment system. The findings indicate that digital strategy planning has been integrated with the 2025-2029 Surabaya Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) vision, although physical infrastructure synchronization at several locations remains a challenge. Organizing is conducted in a cross-sectoral collaborative manner involving academics through a strategic partnership model. Regarding the staffing aspect, personal technical assistance provided by field staff and students has proven crucial in increasing traders' digital literacy, as evidenced by the significant improvement in understanding at the Wonorejo SWK unit, which rose from 56% to 89%. The controlling mechanism is carried out through digital transaction monitoring, although technical network stability remains the primary obstacle to program sustainability. The novelty of this research lies in the systematic application of classical management theory to dissect the dynamics of the informal sector during the digital transition at the local level. These implications emphasize that the success of MSME digitalization depends not only on technology but also on sustainable human resource mentoring. This study contributes to advancing knowledge in the field of organizational management psychology, specifically regarding technological adaptation behavior among micro-entrepreneurs within the public bureaucracy environment.

Keywords: POSC Management, SWK Digitalization, Culinary MSMEs, Digital Economic Transformation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas manajemen publik dalam menavigasi transformasi ekonomi digital di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Kota Surabaya melalui pendekatan teori POSC. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang mengevaluasi berbagai dokumen kebijakan, publikasi pemerintah, dan artikel ilmiah terkait implementasi platform E-PEKEN dan sistem pembayaran QRIS. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa perencanaan strategi digital telah terintegrasi dengan visi RPJMD Kota Surabaya 2025-2029, namun masih menghadapi tantangan sinkronisasi infrastruktur fisik di lapangan. Pengorganisasian dilakukan secara kolaboratif lintas sektoral dengan melibatkan akademisi melalui model kemitraan strategis. Pada aspek *staffing*, pendampingan teknis secara personal oleh staf lapangan dan mahasiswa terbukti krusial dalam meningkatkan literasi digital pedagang, seperti kenaikan pemahaman di SWK Wonorejo dari 56% menjadi 89%. Mekanisme pengawasan telah dilakukan melalui pemantauan transaksi digital, meskipun kendala teknis jaringan tetap menjadi penghambat utama keberlanjutan program. Kebaruan penelitian ini terletak pada aplikasi teori manajemen klasik untuk membedah dinamika sektor informal dalam transisi digital di tingkat lokal. Implikasi penelitian menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi UMKM tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi pada pendampingan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Kajian ini memberikan kontribusi dalam memajukan pengetahuan bidang psikologi manajemen organisasi, khususnya mengenai perilaku adaptasi teknologi pada pelaku ekonomi mikro di lingkungan birokrasi publik.

Kata Kunci: Manajemen POSC, Digitalisasi SWK, UMKM Kuliner, Transformasi Ekonomi Digital

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pondasi perekonomian nasional yang memiliki peran strategis dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Lintangsari & Mas'dah, 2024). Di Kota Surabaya, sektor ini menunjukkan gerakan yang sangat dinamis dengan jumlah unit usaha yang terus bertambah hingga melampaui angka 60.000 UMKM (Krisnawati, 2024). Potensi besar ini merupakan modal berharga bagi pembangunan ekonomi daerah, namun pertumbuhan jumlah pedagang yang tidak terkendali di ruang publik sering kali memicu permasalahan tata kota yang kompleks. Kehadiran pedagang kaki lima (PKL) yang menempati trotoar dan badan jalan secara ilegal terbukti mengganggu estetika lingkungan serta memicu kemacetan lalu lintas yang merugikan kepentingan publik (Sari & Meirinawati, 2021). Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (DINKOPUMDAG) melakukan langkah pengelolaan berupa penataan dan relokasi PKL ke fasilitas resmi yang disebut Sentra Wisata Kuliner (SWK) agar aktivitas perdagangan menjadi lebih sehat, layak, dan terjamin (Ermawati *et al.*, 2022).

Penyediaan fasilitas fisik berupa stan permanen di SWK ternyata belum menjadi jaminan mutlak bagi keberlanjutan usaha para pedagang di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Fenomena "mati suri" yang dialami oleh beberapa SWK, seperti yang terjadi di wilayah Wonorejo dan Urip Sumoharjo, menunjukkan adanya penurunan jumlah pengunjung yang signifikan akibat perubahan pola konsumsi masyarakat yang mulai beralih ke transaksi digital dan layanan pesan-antar daring (Rafelia *et al.*, 2026). Alasan utama dilakukannya digitalisasi adalah untuk menjembatani kesenjangan antara metode perdagangan konvensional dengan

tuntutan pasar modern. Pemerintah Kota Surabaya kemudian meluncurkan inovasi melalui platform *e-commerce* lokal E-PEKEN serta standarisasi sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS (Agustin *et al.*, 2025). Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi terhadap proses transisi digital tersebut, mengingat di lapangan masih ditemukan hambatan berupa rendahnya literasi digital pedagang, keterbatasan sarana teknologi dari pelaku usaha tradisional yang belum terbiasa dengan ekosistem digital.

Permasalahan mendasar dalam digitalisasi SWK bukan sekadar pada ketersediaan aplikasinya, melainkan pada bagaimana manajemen publik mengelola sumber daya manusia dan pengawasan sistem agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Tanpa manajemen yang terstruktur, bantuan modal dan teknologi berisiko tidak termanfaatkan secara optimal sehingga gagal meningkatkan pendapatan riil bagi para pedagang (Maulana & Subroto, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas manajemen publik dalam menavigasi digitalisasi SWK di Kota Surabaya dengan menggunakan pendekatan teori POSC (*Planning, Organizing, Staffing, Controlling*). Melalui kerangka ini, analisis akan difokuskan pada ketepatan perencanaan strategi digital, kualitas pendampingan staf lapangan kepada pedagang yang gagap teknologi, dan mekanisme pengawasan operasional untuk memastikan keberlangsungan transaksi digital.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pemikiran baru mengenai model manajemen transformasi digital yang inklusif bagi pelaku ekonomi mikro, dan memperkaya literatur mengenai tata kelola transformasi digital pada sektor informal. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam menyempurnakan pemberdayaan UMKM, penguatan kapasitas digital dan profesionalisme PKL. Dengan manajemen yang terstruktur melalui pendekatan POSC, digitalisasi diharapkan mampu menjadi penggerak bagi pemulihan ekonomi lokal dan mewujudkan SWK sebagai pusat kuliner di era ekonomi digital.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis strategi manajemen publik pada transformasi digital Sentra Wisata Kuliner (SWK) di Kota Surabaya. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan fenomena pengelolaan. Pemilihan metode studi literatur ini didasarkan untuk mengeksplorasi melalui pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber yang relevan (Febrianto & Siroj, 2024). Tujuan penelitian difokuskan pada analisis efektivitas penerapan teori POSC dalam mengarahkan digitalisasi. Subjek penelitian dalam kajian mencakup dokumen kebijakan resmi, artikel jurnal ilmiah, dan data publikasi resmi terkait implementasi sistem pembayaran QRIS dan platform E-PEKEN di Surabaya. Pengumpulan data dilakukan melalui strategi evaluasi terhadap artikel, dan publikasi pemerintah untuk memperoleh gambaran

mengenai isu yang akan dibahas. Teknik analisis data menggunakan analisis model interaktif yang meliputi tahap penyaringan informasi, penyajian data, dan verifikasi data untuk menjamin hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Strategi Digitalisasi (*Planning*)

Perencanaan dalam pengelolaan SWK di Kota Surabaya dilakukan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam menata PKL sekaligus mendorong penguatan ekonomi daerah. Keberadaan PKL yang sebelumnya tersebar luas dan tidak terorganisir, mendorong pemerintah untuk merancang kebijakan penataan melalui pembentukan SWK sebagai wadah usaha yang lebih terstruktur. Implementasi kebijakan penataan PKL ini diatur agar tetap selaras dengan estetika kota (Wiyoto *et al.*, 2024). Dengan demikian, perencanaan SWK tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga berfokus pada menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih aman, nyaman, dan produktif bagi UMKM (Sari & Meirinawati, 2021). Lebih lanjut, strategi pemberdayaan UMKM yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, khususnya Dinkopumdag, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung usaha kuliner. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya berkonsentrasi pada penataan usaha, tetapi juga berkonsentrasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan daya saing perusahaan UMKM (Nabila & Nawangsari, 2022). Pendekatan ini sejalan dengan konsep pemberdayaan yang menekankan pentingnya peningkatan kemampuan pelaku usaha agar dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang ketat.

Dalam konteks perkembangan ekonomi digital, perencanaan SWK juga mulai diarahkan pada integrasi teknologi dalam aktivitas usaha. Salah satu inovasi digital yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah platform E-PEKEN, yang memungkinkan UMKM untuk memasarkan dan menjual produk mereka secara daring, dan acuan utama transaksi lokal yang didukung oleh kebijakan wajib belanja bagi ASN Pemkot Surabaya (Fattah *et al.*, 2026). Perencanaan ini tidak hanya berfokus pada penyediaan platform, tetapi mencakup target jangka panjang digitalisasi pedagang SWK melalui integrasi berbagai fitur, seperti pencatatan transaksi, sistem pembayaran non-tunai, dan kemudahan bagi konsumen untuk menemukan lokasi dan produk kuliner. Dengan adanya digitalisasi ini, perencanaan pengelolaan SWK tidak lagi bersifat konvensional, melainkan mulai beralih pada sistem yang lebih canggih dan berbasis teknologi.

Selain itu, perencanaan transformasi digital saat ini telah diselaraskan dengan visi pembangunan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 (Pemerintah Kota Surabaya, 2025). Dokumen tersebut menekankan pentingnya transformasi melalui inovasi, penguatan sektor ekonomi berbasis nilai tambah, dan pemanfaatan teknologi dalam berbagai sektor strategis. Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa digitalisasi UMKM,

termasuk industri kuliner melalui SWK, merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah tersebut juga disinkronkan dengan arah pembangunan daerah yang menargetkan terciptanya masyarakat yang adaptif terhadap perubahan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh (Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 68 Tahun 2025 Tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Surabaya Tahun 2025-2029, 2025). Namun demikian, implementasi perencanaan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa diantaranya adalah persaingan dengan tempat makan modern dan keterbatasan kualitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna, khususnya dalam mengintegrasikan aspek digitalisasi agar pengelolaan SWK dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan (Sari & Meirinawati, 2021).

Pengorganisasian Aktor dan Struktur (*Organizing*)

Pengorganisasian dalam pengelolaan SWK di Surabaya dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas antar perangkat daerah serta sektor pelaksana di lapangan. Dinkopumdag bertanggung jawab atas pemberdayaan pelaku UMKM dengan memberikan pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas usaha (Rizki *et al.*, 2025). Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan sistem digital, termasuk platform yang digunakan dalam mendukung aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Pembagian tugas antara Dinkopumdag sebagai pelaksana pemberdayaan dan Diskominfo sebagai pengelola sistem menunjukkan adanya koordinasi lintas sektor dalam mendukung transformasi digital. Hal ini menjadi sangat penting karena implementasi kebijakan tidak hanya membutuhkan kesiapan dalam hal teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dalam penggunaannya (Febrianto & Siroj, 2024).

Pengorganisasian dalam transformasi digital SWK di Surabaya diatur melalui struktur koordinasi lintas sektoral yang mengintegrasikan level manajerial pusat dengan pelaksana lapangan. Di tingkat pemerintahan kota, pembagian tugas dilakukan secara spesifik: Dinkopumdag bertanggung jawab penuh atas pemberdayaan, legalitas usaha (NIB), dan peningkatan kapasitas pedagang, sementara Diskominfo berperan sebagai penyedia infrastruktur teknologi dan pengelola teknis platform E-PEKEN. Namun, keberhasilan pengorganisasian ini sangat bergantung pada struktur pendukung di tingkat lokal. Pihak Kecamatan memegang peranan penting dalam memberikan rekomendasi izin pemakaian stan dan memverifikasi data pedagang yang akan masuk ke ekosistem digital. Di tingkat operasional unit, terdapat Koordinator SWK dan Ketua Paguyuban yang bertindak sebagai jembatan informasi untuk mendistribusikan instruksi digital dari dinas pusat kepada masing-masing pedagang.

Selain struktur formal birokrasi, pemerintah kota juga menerapkan model pengorganisasian kolaboratif. Hal ini terlihat dari pihak akademisi (seperti

Universitas Ciputra atau Universitas Airlangga) yang ditugaskan membantu penataan interior dan strategi rebranding digital tiap unit SWK agar lebih menarik bagi konsumen modern. Struktur organisasi yang berlapis dan kolaboratif ini memastikan bahwa kebijakan digitalisasi tidak hanya berhenti sebagai dokumen di pusat, tetapi memiliki unit pelaksana yang aktif melakukan pendampingan harian di tiap stan pedagang.

Pengelolaan SDM (*Staffing*)

Tahap pengelolaan sumber daya manusia dalam digitalisasi SWK di Kota Surabaya merupakan pondasi karena mayoritas pedagang memiliki tingkat literasi teknologi yang sangat bervariasi. Hambatan utama yang ditemukan dalam data menunjukkan bahwa faktor usia pedagang dan latar belakang pendidikan yang rendah sering kali memicu kesulitan dalam mengadopsi sistem digital yang kompleks. Untuk menjembatani celah literasi tersebut, pemerintah melakukan digitalisasi terpadu agar pedagang mampu beradaptasi dengan ekosistem pasar modern (Santoso *et al.*, 2022).

Dinkopumdag menggerakkan staf lapangan dan berkolaborasi dengan pihak akademisi melalui program magang mahasiswa (MSIB) maupun Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk bertindak sebagai fasilitator harian bagi para pedagang. Para pendamping ini melakukan pendekatan personal dalam membimbing pedagang melakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk memberikan kepastian legalitas usaha (Prastika & Nugroho, 2025). Selain itu, staf pendamping berperan aktif dalam memfasilitasi pembuatan akun sistem pembayaran QRIS dan membantu mendaftarkan titik lokasi stan di platform Google Maps untuk meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas pedagang bagi konsumen luas. Peningkatan kapasitas SDM juga difokuskan pada penguatan literasi keuangan dan keterampilan teknis produksi. Pedagang diberikan pembekalan mengenai tata kelola manajemen keuangan usaha, termasuk pengenalan produk perbankan seperti KUR, asuransi, dan tabungan untuk mendukung stabilitas arus kas.

Selain literasi digital, pemerintah juga menghadirkan tenaga ahli seperti chef profesional untuk memberikan pelatihan keterampilan memasak dan manajemen produk agar kualitas sajian kuliner tetap berdaya saing tinggi. Hasil dari strategi staffing yang efektif ini terlihat nyata di unit SWK Wonorejo, di mana pendampingan personal berhasil meningkatkan pemahaman pedagang terhadap transaksi keuangan digital dari semula 56% menjadi 89% (Agustin *et al.*, 2025). Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan transformasi digital di sektor informal sangat bergantung pada kehadiran staf pendamping yang mampu membangun rasa percaya pedagang terhadap teknologi.

Pengawasan dan Evaluasi (*Controlling*)

Mekanisme pengawasan dalam digitalisasi SWK di Kota Surabaya dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan bahwa transformasi dari sistem konvensional ke digital berjalan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan. Dinkopumdag menjalankan fungsi pengawasan harian melalui staf pendamping yang bertugas

memantau aktivitas perdagangan, kondisi fasilitas fisik, hingga keaktifan pedagang dalam menggunakan platform digital. Pengawasan ini mencakup pemantauan terhadap arus kas dan omzet harian pedagang yang tercatat melalui sistem pembayaran non-tunai dan aplikasi E-PEKEN untuk menjaga transparansi manajemen keuangan. Selain itu, status pendaftaran usaha pada layanan QRIS dan visibilitas di Google Maps diverifikasi secara daring untuk memastikan data yang ditampilkan kepada konsumen tetap valid dan akurat.

Proses evaluasi dilakukan secara berkala, baik melalui rapat koordinasi bulanan maupun monitoring untuk menangani permasalahan internal yang bersifat mendesak (Putri & Munandar, 2021). Dalam tahap ini, manajemen publik juga mengumpulkan respons dan keluhan dari pengunjung untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap layanan digital dan kenyamanan fasilitas SWK. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, ditemukan sejumlah kendala teknis yang menjadi tantangan keberlanjutan digitalisasi, seperti stabilitas jaringan internet yang tidak merata di seluruh titik lokasi dan keterbatasan perangkat pendukung yang dimiliki pedagang (Mahasa & Nawangsari, 2025). Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan adanya kecenderungan rendahnya konsistensi sebagian pelaku usaha dalam melakukan pembaruan konten produk pada platform digital.

Sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan, pemerintah daerah melakukan intervensi berupa pembinaan ulang dan pendampingan lanjutan bagi pedagang yang masih mengalami hambatan teknis maupun psikologis terhadap teknologi. Melalui sistem pengawasan yang berkelanjutan, manajemen publik dapat melakukan deteksi dini terhadap fenomena unit usaha yang mulai menurun performanya sehingga langkah revitalisasi dapat diambil secara tepat sasaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan fungsi manajemen publik melalui pendekatan POSC dalam transformasi digital SWK di Surabaya secara umum telah berjalan ke arah yang lebih baik, namun belum sepenuhnya optimal. Pada tahap planning, pemerintah telah menunjukkan arah kebijakan yang jelas melalui pengembangan SWK dan integrasi digital, seperti peluncuran platform E-PEKEN, untuk mendorong ekonomi digital berbasis UMKM. Pada tahap organizing, juga telah terbentuk peran yang cukup sistematis antar instansi seperti DINKOPUMDAG, DISKOMINFO, dan koordinator SWK di lapangan dalam mendukung implementasi kebijakan. Selanjutnya, dalam tahap staffing upaya dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendampingan, dan literasi digital telah memberikan dampak positif untuk pedagang dalam beradaptasi dengan teknologi. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa pemberdayaan yang terintegrasi dan pendampingan lapangan yang konsisten merupakan kunci keberhasilan transformasi ekonomi digital pada sektor UMKM kuliner di Surabaya (Rizki *et al.*, 2025). Sementara itu, dalam tahap controlling, telah dilakukan mekanisme pengawasan melalui pemantauan transaksi digital dan evaluasi

lapangan sebagai upaya menjaga keberlanjutan operasional SWK. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah permasalahan, seperti keterbatasan literasi digital, infrastruktur pendukung yang belum merata, serta resistensi pedagang terhadap penggunaan teknologi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan fungsi POSC dalam pengelolaan SWK berbasis digital di Surabaya telah berjalan secara efektif, namun masih memerlukan upaya penguatan untuk mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan koordinasi antar instansi, dan pengembangan sistem digital yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh seluruh pelaku usaha. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan daya saing UMKM di era ekonomi digital dan terwujudnya keberhasilan transformasi digital SWK secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Agustin, A. C., Ardianto, H., & Wulanditya, P. (2025). Optimalisasi Literasi Keuangan melalui Sosialisasi pada Pedagang Sentra Wisata Kuliner Wonorejo Surabaya. *Room of Civil Society Development*, 4(5), 779-789. <https://doi.org/10.59110/rcsd.748>
- Ermawati, Y., Sodikin, M., & Supeni, E. (2022). *Strategi Pemberdayaan UMKM Berbasis Sentra Wisata Kuliner Di Surabaya*. 390-404.
- Fattah, R. A., Harianto, I. M., Bisnis, E., & Airlangga, U. (2026). Eskalasi Bisnis Kuliner Melalui Literasi Digital Di Sentra Wisata Kuliner Kota Surabaya. *Jurnal Abdi*, 11(2), 129-134.
- Febrianto, A., & Siroj, R. A. (2024). Studi Literatur : Landasan Dalam Memilih Metode Penelitian Yang Tepat. *Journal Educational Research and Development*, 01(02), 259-263.
- Krisnawati, A. (2024). Penerapan Program Pendampingan UMKM Dalam Meningkatkan Kualitas Umkm Di Sentra Wisata Kuliner Pegirian Surabaya. *AT-TARIIZ: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(03), 204-219. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v3i03.1229>
- Lintangsari, D. P., & Mas'dah. (2024). Meningkatkan Pengunjung Di Sentra Wisata Kuliner (Studi Kasus : Sentra Wisata Kuliner Bratang Binangun). *Jurnal Ekono Insentif*, 18(2), 74-82. <https://doi.org/10.36787/jei.v18i2.1764>
- Mahasa, H. A., & Nawangsari, A. T. (2025). Persepsi dan Praktik Pengelolaan Keuangan UMKM di Surabaya pada Era Transformasi Digital. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(5), 1262-1275. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i5.843>
- Maulana, J. S., & Subroto, W. T. (2025). Peran QRIS terhadap Pendapatan UMKM di Era Digital : Studi SWK Ketintang Surabaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 4044-405. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2065>
- Nabila, A. S., & Nawangsari, E. R. (2022). Startegi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Sentra Wisata Kuliner Wiyung Kota

- Surabaya. *Jurnal Noken Ilmu Ilmu Sosial*, 8(1), 135–144. <https://doi.org/10.33506/jn.v8i1.1798>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2025). *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029*.
- Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 68 Tahun 2025 Tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Surabaya Tahun 2025-2029 (2025). <https://jdih.surabaya.go.id/uploads/peraturan/2025perwali3578068.pdf>
- Prastika, R. B., & Nugroho, R. H. (2025). Pengembangan Digitalisasi Usaha Melalui Pendampingan Pendaftaran NIB: Studi Pengabdian Masyarakat Pada UMKM SWK Kasuari Surabaya. *Jurnal Sinabis*, 1(April), 587–595.
- Putri, R. S. E., & Munandar, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 2296–2313.
- Rafelia, V., Sunarko, C., Dwiyantri, T. M., Saskia, A., & Risty, M. (2026). Peran Dinas Koperasi UKM Dan Perdagangan Kota Surabaya Dalam Pemulihan Keberlanjutan Sentra Wisata Kuliner Wonorejo. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4.
- Rizki, A. K., Yuanita, A. A., Saputri, S. A., & Sari, S. M. (2025). Pemberdayaan Sentra Wisata Kuliner (SWK) Kecamatan Jambangan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5, 5519–5527.
- Santoso, W., Pranoto, H. S., & Septina, F. (2022). Digitalisasi Sentra Wisata Kuliner Wiyung Kota Surabaya , Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK*, 6, 71–78. <https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2022.v6i1.2919>
- Sari, A. W., & Meirinawati. (2021). *Manajemen Strategi Program Sentra Wisata Kuliner Urip Sumoharjo Oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Surabaya Ayu Wandan Sari Meirinawati Abstrak*. 105–118.
- Wiyoto, A. A., Desa, K., Kecamatan, K., Kabupaten, P., & Publik, K. (2024). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Taman. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 121–132. <https://doi.org/10.30742/juispol.v4i2.4140>